

HUBUNGAN ISLAM DAN POLITIK MASA ORDE BARU

Okrisal Eka Putra

A. PENDAHULUAN

Perkembangan krisis yang terjadi pada penghujung Orde lama dan akibat yang ditimbulkannya, yaitu berupa kelahiran era Orde Baru. Kita juga harus melihat respon umat Islam ketika melihat kejatuhan Orde Lama dan kelahiran sebuah orde yang sangat dinantikan oleh umat Islam, khususnya dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara atau politik. Di era Orde Baru nanti akan dilihat dinamika umat Islam ketika berhadapan dengan sebuah negara yang baru lahir. Tentu saja banyak harapan dan impian yang selama ini tersekat oleh beberapa faktor yang ada, tak terkecuali dari pihak umat Islam sendiri. Bab ini diharapkan nanti memberikan gambaran tentang respon politik umat Islam terhadap gerakan Orde Baru di Indonesia.

Secara teoritik, negara Orde Baru adalah negara organik dengan sifat pluralis dalam state.¹ Dengan begitu, sebagai negara organik, maka Indonesia merupakan negara yang mempunyai kemandirian yang cukup besar dan bukan merupakan cerminan dari tuntutan dan kepentingan dalam masyarakat. Negara berperan aktif dan mengambil keputusan dengan sangat tidak demokratis. Dalam negara model ini, konsep “dari, oleh, dan untuk rakyat” tidak berlaku. Negara model ini dalam perkembangannya akan berubah menjadi negara totalitarisme.²

Tentang makna Orde Baru, Soeharto berkata;

“Yang dimaksud dengan Orde Baru ialah peraturan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa

dan negara yang kita letakkan kembali kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 45".³

Sebelum Orde Baru muncul, ada beberapa keadaan politik Indonesia yang terjadi dan juga menjadi cikal bakal dari lahirnya Orde Baru ditandai, hal tersebut dengan enam ciri:

- a. Kegagalan sistem multi partai
- b. Percaturan politik yang bertumpu pada dasar ideology partai dalam suasana masyarakat yang belum cukup menghayati aturan permainan politik yang ada
- c. Perpecahan karena campur tangan partai ke dalam birokrasi dan menjadikan birokrasi sebagai dasarnya
- d. Partai politik mempergunakan corak totalitarian
- e. Penyusupan partai komunis ke dalam tubuh ABRI sehingga menimbulkan ketegangan di tubuh angkatan darat, dan interaksi politik di desa ditandai oleh nilai-nilai primodial, orientasi "parochial" dan hubungan "patron-klien" sehingga mengurangi persatuan pedesaan dan menimbulkan konflik "interpersonal".⁴

Manakala Orde Baru lahir, umat Islam mulai menaruh harapan besar untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis. Disamping itu, para politisi Islam mulai dilepaskan dari penjara. Mereka seakan-akan sudah dapat kembali ke kancah politik. Mereka percaya bahwa Orde Baru akan memberikan nuansa kehidupan yang lebih dari Orde Lama. Karena itu, menjelang runtuhnya rezim Orde Lama mereka tanpa ragu-ragu langsung mendukung dan bergandengan tangan dengan para arsitek Orde Baru untuk membidani lahirnya era baru tersebut.

Respon umat Islam ketika Orde Baru bangkit mengikuti tiga pola. *Pertama*, pola apologi, kemudian diikuti dengan usaha penyesuaian diri dan adaptasi terhadap modernisasi. *Kedua*, juga melakukan apologi terhadap ajaran-ajaran Islam, tapi menolak modernisasi yang dinilai sebagai westernisasi dan sekulerisasi. *Ketiga*, pola tanggapan yang kreatif dengan menempuh jalan dialogis yang mengutamakan pendekatan intelektual dalam menanggapi modernisasi.⁵

Sementara itu, ada beberapa hal yang menyebabkan hubungan antara pemerintah dan Islam tidak harmonis pada periode awal perjalanan

Orde Baru: *pertama*, Islam sangat percaya pada demokrasi⁶. *Kedua*, orang-orang Islam adalah mayoritas penduduk Indonesia sehingga dengan mekanisme penyelenggaraan negara yang demokratis akan mudah bagi Islam untuk mengambil kendali kehidupan politik dan mewujudkan nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupan politik. *Ketiga*, adanya individu-individu di kalangan umat Islam yang menginterpretasikan Islam secara *harfiah/ketat* sehingga dalam proses artikulasinya sering dilakukan secara keras dan memicu konflik-konflik yang *primodialistik*. *Keempat*, terutama kalangan Angkatan Darat, karena pengalaman masa lampau yang sangat traumatic dengan DI/TII, Kahar Muzakkar, Daud Beureueh, mempunyai persepsi kurang positif bahkan cenderung mencurigai pihak Islam sebagai ekstrim kanan. *Kelima*, karakteristik pemerintahan yang otoriter yang dipilih sebagai upaya membentuk format politik yang baru terutama dalam masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru.⁷

Posisi umat Islam dan pemerintah era Orde Baru periode pertama berada dalam posisi berhadapan (*vis a vis*), ditambah dengan berbagai kasus yang semakin merenggangkan hubungan tersebut, sebutlah kasus Tanjung Priok, Lampung, Peledakan Borobudur dan

lain lain. Ini terjadi karena orang-orang dekat Soeharto kebanyakan dari kalangan non muslim, para Jenderal militer masih didominasi oleh golongan anti Islam. Ini bisa dimaklumi karena umat Islam tidak banyak menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah militer pada masa penjajahan. Akhirnya tokoh-tokoh yang berpendidikan tinggi lebih banyak di dominasi oleh kalangan non muslim. Barulah setelah awal kemerdekaan banyak umat Islam yang mengenyam pendidikan tinggi, sehingga awal 90-an generasi muslim banyak memiliki generasi terdidik dalam bidang akademik dan militer.

Tumbuhnya kaum terpelajar dan kelompok *intelegensia* merupakan salah satu perkembangan penting di lingkungan muslim-santri pada masa Orde Baru. *Perkembangan* ini didorong oleh kebijaksanaan negara yang memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat luas untuk menduduki bangku-bangku sekolah. Keadaan ini berbeda sekali dengan politik pendidikan masa pemerintahan kolonial. Dalam masa penjajahan, mereka yang memiliki peluang paling besar memperoleh pendidikan adalah anak dari kalangan bangsawan, priyayi, dan mereka yang beragama Kristen/Katolik yang mendapat subsidi kuat dari Gereja.

B. GERAKAN PEMBAHARUAN ISLAM ZAMAN ORDE BARU

Sejalan dengan arah perubahan pola kehidupan politik, perkembangan pemikiran Islam cenderung bersifat rasional dan fungsional. Hal ini dapat dilihat dalam tema umum pembaharuan pemikiran Islam disepular reaktualisasi, kontekstualisasi dan pembumian ajaran Islam. Kecenderungan perubahan di atas memberikan gambaran proses integrasi-birokrasi-santri pada masa Orde Baru. Suatu proses yang meruntuhkan mitos politik santri sebagai oposan dan pembangkang.⁸ Dengan hilangnya mitos tersebut, perilaku politik muslim cenderung rasional dengan runtuhnya ideologi politik yang mendasarkan Islam bersamaan dengan tergesernya konsep negara Islam.

Perubahan perilaku politik muslim erat juga hubungan dengan kerangka utama politik Orde Baru terhadap pemeluk Islam yang secara nominal merupakan bagian terbesar warga negara terletak kalam konsep deideologisasi Islam sebagai agama dan birokratisasi kehidupan pemeluk Islam dalam mempraktekkan ajaran agama yang menjadi keyakinannya. Deideologisasi pada akhirnya melunturkan watak ideologi Islam, setidaknya secara formal. Demikian

pula birokratisasi kehidupan agama telah menempatkan hampir seluruh aktifitas sosial muslim dalam kontrol dan pelayanan pemerintah bersamaan dengan kooperatisasi yang menempatkan elite santri dalam berbagai lembaga sosial yang dibentuk dan dikontrol oleh pemerintah.

Kemunculan pesantren-pesantren⁹ di banyak kota besar dan banyaknya alumninya yang melanjutkan studinya di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri sangat berdampak pada citra pendidikan pesantren, pesantren tidak lagi dilihat sebagai institusi yang melanggengkan kekolotan, kemunduran serta label-label negatif lainnya. Bahkan banyak pengamat yang justru melihat dari pesantrenlah akan muncul pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Berbagai pihak menyebutkan bahwa salah satu tradisi paling unik dan memiliki kemandirian yang sangat tinggi serta mempunyai harapan di masa depan adalah pendidikan pesantren. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam tradisionalisme pesantren terdapat potensi modernitas yang tinggi yang mempunyai corak pembinaan nilai yang berdasarkan Islam, sehingga terbentuk pribadi yang utama. Dengan demikian Islam dapat memberikan pengaruh positif bagi

pendidikan dan kebudayaan di Indonesia, juga dapat menjadi tulang punggung dalam modernisasi dan memberikan bekal yang cukup bagi manusia Indonesia dalam menghadapi modernisasi, karena bagaimanapun juga manusia merupakan subyek dalam pendidikan Islam.

Pada masa Orde Baru, umat Islam baik dari kalangan tradisional terutama dari kalangan modernis masih tetap berkeinginan untuk melestarikan pemikiran-pemikiran formalisme pendidikan. Disamping karena keinginan kalangan elit muslim untuk bernostalgia semasa kejayaan politik Islam pada masa Orde Lama, juga karena masih tetap berkembangnya pola dasar pandangan miring antara sesuatu yang dianggap sebagai masukan Islam dan masukan non Islam (Barat) ketika mereka saling berhadapan dengan tantangan modernisasi. Dalam pencarian posisi menurut konstelasi baru dan masih dalam lingkungan teoritis dan intelektual, belum memberikan jawaban tegas dan pasti tentang persepsi ke-islaman terhadap modernisasi.

Kecenderungan kalangan intelektual muda untuk melakukan pembaruan tersebut menemukan formatnya ketika Nurkholis Majid¹⁰ menyampaikan gagasan tentang

pentingnya pemikiran Islam dalam satu tempat organisasi pemuda dan mahasiswa Islam, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Persatuan Sarjana Muslim Indonesia (PERSAMI) dan Gerakan Pemuda Islam (GPI).¹¹

Pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia tidak lahir dengan begitu saja dan terkesan tiba-tiba. Dan juga tidak lahir dalam ruang sosio histories yang tidak bermakna. Dalam banyak kasus, pembaharuan selalu muncul dengan berbagai persoalan yang merupakan kelanjutan dari pembaharuan pemikiran Islam yang pernah muncul pada masa-masa sebelumnya. Sebagai contoh, Azyumardi Azra mengomentari pemikiran Nurcholis Madjid tentang "Islam Yes, Partai Islam No", konsep ini tidak muncul secara tiba-tiba, ia lahir dari pemikiran-pemikiran hasil renungan dan kajian mendalam para pemikirnya pada waktu yang lalu, begitu juga terhadap kelahiran organisasi-organisasi Islam, perubahan yang terjadi di dalamnya sesuai dengan permasalahan situasi sosio histori, dan kondisi politik yang menyertainya.¹²

Gerakan Islam kontemporer muncul di Indonesia awal 1970. gerakan ini sebagai kelanjutan dari pembaharuan pada masa klasik (abad ke 17) hingga tahun 1969. berbagai

factor menjadi penyebab kelahiran gerakan ini, seperti yang diungkapkan Nurcholis ketika menyampaikan gagasan pembaharuannya di Menteng Raya tanggal 3 Januari 1970 sebagai berikut: *Pertama*, bahwa organisasi-organisasi yang menerima aspirasi pembaharuan seperti Muhammadiyah, Al Irsyad, dan Persis telah berhenti sebagai pembaharu-pembaharu, karena ketiga organisasi ini tidak sanggup berbuat dan mengungkapkan semangat dan ide pembaharuan itu sendiri. Iaitu dinamika semangat juang. *Kedua*, organisasi-organisasi kontra reformasi seperti NU, Al Wasliyah, dan yang lain ternyata telah melakukan sendiri dan menerima nilai-nilai pembaharuan. *Ketiga*, terjadinya stagnasi pemikiran secara menyeluruh yang melanda umat Islam.¹³

Bachtiar Efendi berpendapat bahwa warna yang diletakkan dalam konteks Indonesia pada tahun 1970-an, suatu periode yang mengungkap sejarah pembaharuan keagamaan menjadi semakin jelas, kalau boleh dikatakan bahwa periode 1970-an merupakan *water set* pembaharuan pemikiran keagamaan.

Bachtiar Efendy lebih cenderung melihat gerakan Islam kontemporer 1970-an itu dalam tiga bab besar, *Pertama*, Pembaruan di

bidang teologi, *kedua*, pembaharuan dalam bidang politik dan birokrasi, *ketiga*, pembaharuan dalam bidang transformasi sosial.

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa pembaharuan itu mempunyai makna yang sangat luas bukan hanya menjadi bahan perbincangan namun dilihat pada warna yang dikembangkan. Karena itu menurut Bachtiar Efendy menjadi sulit untuk mengembangkan suatu apresiasi/pengenalan yang sifatnya tunggal. Akan tetapi, untuk konteks pengalaman Indonesia kategori-kategori ini pernah muncul, seperti Kamal Hasan, Fazan atau Federspil, mereka cenderung membuat kategori-kategori pembaharuan itu seperti "kelompok ideal", "kelompok realistik" atau rasional, dan "kelompok akomodasi". Dalam konteks yang baru, Fachri Aldan Bachtiar Efendy membagi pemikiran Islam Indonesia kepada "Neo Modern Islam, Sosialisme, Demokrasi Islam, Internasionalisme, dan Universalisme Islam, dan modernis Islam". Sedangkan M. Syafii Anwar menampilkan kategori yang disebut sebagai "Formalistik, Substansialistik, transformalistik, totalistik, idealistik, realistik." Dalam banyak hal, kesemuanya dirujuk kepada kedudukan para pemikir terhadap masalah yang dihadapi umat Islam,

khususnya yang berhubungan dengan konteks sosial negara, politik, dan ekonomi.¹⁴

Pemikiran formalistik menunjukkan perhatian terhadap suatu orientasi yang cenderung menopang bentuk-bentuk masyarakat politik Islam yang dibayangkan seperti terwujudnya suatu "sistem politik Islam", munculnya partai Islam, ekspresi simbolis dan idiom-idiom politik, kemasyarakatan, budaya Islam, serta eksperimentasi sistem ketatanegaraan Islam.¹⁵ Pemikiran substantivistik adalah aksentuasi bahwa substansi atau makna iman dan peribadatan lebih penting dari pada formalitas dan simbolisme keberagaman serta ketaatan yang bersifat literal kepada teks wahyu Tuhan.¹⁶ Pemikiran ini cenderung melihat bahwa Islam politik lebih baik diimplementasikan melalui jalur cultural. Sehingga, mereka cenderung melihat ajaran-ajaran Islam secara kontekstual. Pemikiran *transformatik* ini bertolak dari pandangan dasar bahwa misi Islam yang utama adalah kemanusiaan. Pada transformasi yang bersifat praktis, perhatian utama para pemikir transformatif bukanlah pada aspek-aspek dokrinal dari teologi Islam, tetapi pada pemecahan masalah-masalah empirik dalam bidang sosial-ekonomi, pengembangan masyarakat, penyadaran hak-

hak politik rakyat, orientasi keadilan sosial, dan sebagainya.¹⁷ Tipologi *totalistik* mempunyai ciri pokok dengan adanya sikap utama yang mendasar dengan menganggap bahwa doktrin Islam bersifat total (*kaffah*), serta mengandung wawasan-wawasan, nilai-nilai dan petunjuk yang bersifat abadi dan lengkap yang meliputi semua bidang kehidupan sosial politik, ekonomi, serta melingkupi segi-segi sama ada individual, kolektif, maupun masyarakat pada umumnya.¹⁸ Pemikiran idealistik adalah suatu pemikiran yang bertolak dari pandangan pentingnya perjuangan umat untuk berorientasi pada tahapan menuju "Islam cita-cita (ideal Islam).¹⁹ Sedangkan ciri pokok pemikiran tipe realistik adalah melihat keterkaitan atau melakukan penghadapan antara dimensi substantif dari ajaran ataupun doktrin agama, dengan konteks sosio-kultural masyarakat pemeluknya.²⁰

Akhirnya respon intelektual muslim terhadap Orde Baru secara garis besar mengikuti corak dan ragam pemikiran yang digagas oleh Nurcholis Madjid tersebut.

C. PERUBAHAN SIKAP AKOMODATIF PEMERINTAH ORDE BARU

Perubahan sikap Orde Baru yang akomodatif terhadap umat Islam sebenarnya merupakan konsekuensi

logis dari fenomena sosial dari tahun 80-an berupa terjadinya islamisasi birokrasi. Proses ini ditandai dengan masuknya sarjana-sarjana muslim ke jenjang birokrasi, Badan usaha milik negara (BUMN), parpol dan kelompok sosial lainnya yang bertaraf nasional. Keislaman yang mereka tampilkan tidak lagi bersifat partisan, tetapi lebih bersifat paguyuban yang menekankan serba harmoni. Mereka berjasa dalam mengembangkan saling pengertian antara umat Islam dengan pemerintah. Proses yang semacam ini sebagai proses "integrasi birokratik-santri". Proses tersebut tidak bisa dilepaskan dari usaha pemerintah Orde Baru dalam mengembangkan modernisasi birokrasi dari sistem pendidikan Islam.

Bukti nyata dari itu semua adalah apa yang terjadi pada bulan desember 1990, presiden Soeharto memberi restu bagi berdirinya ICMI. Sebuah peristiwa yang luar biasa, karena organisasi ini menampung banyak kalangan pegawai pemerintah dan tokoh-tokoh Islam, termasuk beberapa di antara mereka yang sejak dulu sering memberi kritikan tajam kepada Orde Baru dan cara-cara Soeharto menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan Islam.²¹

Pembentukan ICMI bertumpu pada empat alasan:

1. Para anggota ICMI memandang organisasi mereka sebagai media untuk menyuarakan umat Islam, dimana sebelumnya wacana Islam hanya didominasi oleh suara NU dan Muhammadiyah dan beberapa orang Islam terkemuka.
2. ICMI signifikan secara politik sebagai wujud kongkrit perubahan sikap dan pendekatan presiden Soeharto kepada Islam di Indonesia yang mau mengakomodasi kepentingan umat Islam.
3. Pembentukan ICMI yang disokong oleh pemerintah adalah karena Orde Baru, khususnya Soeharto telah merasa menang melawan kekuatan Islam politik.
4. ICMI penting Karena ia berusaha untuk berbicara atas nama kelas menengah baru kota yang sedang meningkat, yakni kalangan muslim terdidik atau terpelajar yang kehadiran mereka menguntungkan program pembangunan ekonomi Orde Baru.

Dengan demikian kelahiran ICMI dapat dijelaskan melalui 2 perspektif, yaitu sosial dan politik. perspektif sosial lebih menekankan pada tumbuhnya

kekuatan politik islamisasi masyarakat Indonesia dan budaya. Perspektif politik lebih memfokuskan pada tumbuhnya konflik elit di dalam negara otoritarian di masa Orde Baru, khususnya mengenai tindakan politik presiden Soeharto.

Kelahiran ICMI ini tak lepas dari peranan mahasiswa. Bermula dari diskusi-diskusi kecil di kampus Universitas Barwijaya Malang, mereka mengkhawatirkan kondisi umat Islam, terutama perpecahan yang terjadi di kalangan cendekiawannya. Yang akhirnya muncul keinginan untuk mengadakan symposium yang menghadirkan para tokoh cendekiawan muslim. Ini sebuah bukti bahwa pendidikan politik mahasiswa merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan intelektual pendidikan. Dan sejarah sudah membuktikannya di tingkat nasional maupun internasional tentang peranan mahasiswa dalam mengubah perjalanan politik suatu bangsa.

Perubahan sikap pemerintah yang mulai akomodatif terhadap aspiratif umat Islam disambut gembira oleh sebagian kelompok Islam seperti Muhammadiyah²² dan NU.

Bakhtiar Efendy menyebutkan ada empat bukti yang menunjukkan tumbuhnya sikap akomodatif negara

terhadap Islam mencakup diterapkannya kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kepentingan sosial-ekonomi dan politik umat Islam.²³

1. Akomodasi Struktural. Ini bisa dibuktikan dengan direkrutnya para pemikir dan aktivis Islam politik generasi baru ke dalam lembaga-lembaga eksekutif (birokrasi) dan legislative negara, seperti dalam tim ekonomi Soeharto, Golkar dan Bappenas. Ada juga mereka yang di promosikan untuk menduduki posisi yang tinggi. Dalam periode itu, orang-orang seperti Abdul Ghafur, Akbar Tanjung, Bustanul Arifin, Saleh Afif, Azwar Anas, Hasrul Harahap, Arifin Siregar, Syamsudin Sumintaputra, Sa'adillah Mursyid dan Syafrudin Baharsyah.²⁴
2. Akomodasi Legislatif. Ini bisa dilihat pada lima hal, (1) disahkannya UU Pendidikan Nasional (UUPN) tahun 1989, (2) diberlakukannya UU Peradilan Agama tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)²⁵ tahun 1991, (3) diubahnya kebijakan tentang jilbab tahun 1991, (4) dikeluarkannya keputusan bersama tingkat menteri berkenaan dengan Badan Amil Zakat, Infak

dan Shadaqah (Bazis) tahun 1991, (5) dihapuskannya Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) tahun 1993.²⁶

3 Akomodasi Infrastruktural. Jenis akomodasi ini pada dasarnya dirancang untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan guna membantu umat Islam dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama mereka. Realisasi paling umum dari akomodasi jenis ini adalah pembangunan mesjid-mesjid yang disponsori negara. Dan juga yang terjadi pada awal 1990-an ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapat dukungan secara finansial dari pemerintah dalam rangka pengiriman seribu orang da'i (muballigh mulim) kedaerah-daerah transmigrasi.²⁷

4 Akomodasi Kultural. Ini bisa dilihat dengan diterimanya idiom-idiom Islam dalam perbendaharaan kosakata instrumen-instrumen politik dan idiologi negara, seperti kata-kata *sultan*, *sayidin*. Kata-kata dalam Pancasila terdiri dari idiom-idiom Islam seperti *adil*, *adab*, *rakyat*, *hikmah*, *musyawarah* dan *wakil*. Jenis ini juga bisa dibuktikan dengan diselenggarakannya festival istiqlal di Jakarta tahun 1991 dan

1995.²⁸

Disamping hal tersebut, pemerintahan Soeharto memperlihatkan dukungan yang nyata bagi perkembangan Islam di tanah air yang juga ditandai dengan sejumlah tindakan dan kebijakan pemerintahan Orde Baru, seperti:

a. Sertifikasi dan labelisasi Halal. Ini merupakan sebuah proyek untuk memeriksa produk makanan, minuman dan komestik dari segi kehalalannya. Produk yang dinyatakan halal diberi sertifikat dan label halal. Proyek ini ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama pemerintah (Depertemen Agama dan Depertemen Kesehatan). Gagasan sertifikasi halal muncul setelah berakhirnya isu lemak babi yang dikhawatirkan terdapat dalam produk makanan tertentu pada akhir 1980-an. Pada saat itu muncul isu tentang kemungkinan adanya lemak babi pada barang konsumsi, umat Islam terdorong untuk mempersoalkan kehalalan produk makanan, minuman, kosmetik yang banyak beredar di pasar. Keinginan umat ini mendapat tanggapan positif dari pemerintah, sehingga lahirlah proyek sertifikasi dan labelisasi halal.²⁹

b. Islam Menjadi Tuan Rumah Beberapa Kegiatan Dunia Islam. Selama tahun 1970-an dan 1980-an Indonesia dianggap kurang dekat dengan negara-negara Islam, khususnya yang berada di Timur Tengah. Ada yang menduga pemerintah Orde Baru khawatir terhadap kelompok-kelompok radikal muslim di Timur Tengah yang akan mempengaruhi kelompok-kelompok muslim di Tanah Air, apabila terjalin hubungan yang dekat dengan negara-negara di kawasan. Pada tahun 1990-an Soeharto sendiri menghadiri KTT OKI (Konfrensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam), dan bahkan Indonesia menjadi tuan rumah bagi beberapa kegiatan dunia Islam, seperti pertemuan OKI, dan IFTIHAR (The International Islamic Forum For Science, Teknologi dan Human Resources) sebuah Forum Islam International untuk pengembangan Iptek dan Sumber Daya Manusia, pada Desember 1996.³⁰

Di balik kebencian umat Islam terhadap Soeharto dan Orde Baru, beberapa pengamat mengatakan bahwa tidak semua yang lahir di zaman Orde Baru harus dihina, tapi Orde Baru juga memberikan banyak hal kepada bangsa Indonesia, baik

dalam hal stabilitas, keamanan, kesejahteraan, dan kemudahan untuk diprediksi.

Robert E Elson mengemukakan, masyarakat Indonesia sebaiknya tidak melupakan Orde Baru dan Soeharto begitu saja, tetapi sebaliknya merefleksikan dengan serius pengalaman yang baru saja lewat. Orde Baru tidak diragukan lagi memberikan banyak hal kepada masyarakat Indonesia, seperti stabilitas, keamanan, kesejahteraan, dan bisa diprediksi (*predictability*).³¹

Selanjutnya Elson juga mengemukakan isu yang penting berkaitan dengan masalah kepemimpinan, yakni perlunya pemimpin yang kuat dan mampu mengambil keputusan, tetapi sekaligus tidak menyebabkan lemahnya institusi-institusi yang ada. Kekuasaan perlu dihindarkan dari kecenderungan tersentralisasi secara berlebihan, namun juga jangan sampai seluruh kekuasaan didesentralisasikan sehingga kekuasaan negara menjadi lemah.

Perlu ada keseimbangan antara kebutuhan individu dan kebutuhan sosial, tanpa harus menonjolkan yang satu dengan mengorbankan yang lain. Perlu ada identitas nasional yang kuat, tetapi sekaligus menghargai kebebasan dan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan etnis dan keagamaan.

Mochtar mengemukakan, pelajaran berharga yang dapat ditarik dari Soeharto adalah betapa besar bahaya menjadi presiden seumur hidup. Bahaya presiden seumur hidup, kata Mochtar, praktik itu akan menyebabkan irasionalitas dalam politik. Persoalan sekarang ini, antara lain perpecahan partai politik, merupakan akibat dari praktik presiden seumur hidup. Dalam hubungan dengan Islam, kata Mochtar, Soeharto melakukan kesalahan dalam memilih kelompok Islam yang diajak bekerja sama. Hasilnya adalah konflik di berbagai daerah. Golkar oleh Soeharto diidentifikasi sebagai partai yang mewakili republik demi mempertahankan kekuasaannya.

Kalangan umat Islam hanya mempunyai kesempatan terbatas dengan menikmati pendidikan tradisional di pesantren dan sekolah pendidikan Islam lainnya seperti di madrasah-madrasah. Ironisnya, di kalangan kaum muslimin sendiri banyak merasa enggan untuk menyekolahkan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan sekuler karena dianggap tidak islami. Akibatnya, setelah kemerdekaan hingga awal periode Orde Baru sektor-sektor modern termasuk birokrasi negara, banyak dikuasai kelompok-kelompok non muslim

dan abangan.

Akibatnya, perlahan-lahan setelah muncul periode kedua pasca 90-an kondisi ini sedikit demi sedikit mulai berubah, mulailah sarjana-sarjana muslim duduk di pemerintahan, memegang jabatan birokrasi, jabatan menteri sudah mulai diisi oleh kalangan muslim, ini berakibat pandangan Soeharto mulai berubah, ini bisa dilihat dari mulai terbentuknya ICMI, keluarnya surat keputusan bersama (SKB) menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tentang pengumpulan Zakat tahun 1991, Soeharto naik haji, jilbab dilegalisasi di sekolah-sekolah, persoalan jilbab telah membuat hubungan umat Islam dan pemerintah Orde Baru sedikit memanas.

Karena berdasarkan SK No. 052/C/Kep/D/1982 yang menyebutkan larangan siswi Muslim mengenakan jilbab di sekolah-sekolah menengah selama jam-jam sekolah. Dan kalau terbukti melanggar akan dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan kebijakan pihak sekolah tersebut, mulai dari teguran, diusir dari ruang belajar, sampai dikeluarkan. Akhirnya terbitnya SK No. 100/C/Kep/D/1991 yang membolehkan para pelajar putri (siswi) Muslim di lembaga pendidikan menengah untuk mengenakan jilbab ketika masuk ke sekolah. Sejalan

dengan itu, mereka yang ingin memakai jilbab karena keyakinan mereka dapat melakukannya tanpa harus takut terkena sanksi.

Ditambah dengan lolosnya Peradilan Agama, pencabutan SDBS tahun 1993, Pendirian BMI, ditunjang dengan suasana religius di kalangan birokrasi. Pemerintah Orde Baru memandang umat Islam harus dianggap sebagai mitra pembangunan.

Setelah banyak sarjana muslim yang duduk di birokrasi, perhatian Soeharto terhadap umat Islam mengalami perkembangan yang positif, tapi Soeharto tetap mempertahankan prinsip menjaga stabilitas keamanan untuk melanjutkan pembangunan, setiap gerakan dan wacana yang mengganggu ketentraman masyarakat, baik itu muncul dari kalangan Islam dan lainnya, Soeharto tidak bisa mentolelirnya, makanya di awal-awal pemerintahannya beliau mendirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengurus seluruh persoalan umat Islam. Semua yang berhubungan dengan Islam harus lewat MUI, kalau MUI mengatakan haram, jangan coba-coba mengatakan halal, itu akan berhadapan dengan Soeharto, mungkin ini salah satu penyebab gerakan-gerakan penyimpangan agama tidak bisa muncul kepermukaan, karena dianggap mengganggu ketentraman

masyarakat, dan tentu saja akan berhadapan dengan Soeharto.

D. PENUTUP

Pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto yang mulai berkuasa sejak 1966, berbeda dengan Orde Lama di bawah Soekarno. Dalam hal ini, Orde Baru lebih tertarik dengan pembangunan ekonomi. Perhatian Orde Baru ini mempunyai implikasi yang jelas bagi politik bangsa Indonesia karena fokusnya pada pembangunan, karena itu membutuhkan suasana politik yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Upaya-upaya untuk memacu pertumbuhan ini menyebabkan aspek-aspek lain dari pembangunan bangsa Indonesia terabaikan. Karena itu, politik tidak berkembang secara alamiah dan lebih banyak digunakan untuk menjamin program-program pembangunan ekonomi. Akibatnya, politik pemerintah Orde Baru secara umum ditandai penekanan pada pentingnya keamanan dan stabilitas politik.

Dengan ditopang oleh ideologi pembangunan dan terciptanya stabilitas, pemerintah Orde Baru menampilkan dirinya sebagai sebuah rezim politik kuat yang represif. Represi telah diposisikan sebagai unsur penting dalam memelihara pembangunan ekonomi. Negara

mencoba memonopoli kekuasaan dan mengendalikan kekuatan-kekuatan sosial politik yang berpotensi memecah dan merusak. Pemerintah Orde Baru tampaknya belajar dari pengalaman Orde Lama yang mengalami instabilitas politik. Karena itu perhatian utama pemerintah Orde Baru adalah merekayasa kehidupan sosial politik masyarakat.

CATATAN:

¹ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 52.

² Kamuaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis & Fundamental*, (Magelang: Indonesia Tera, 2001), hlm. 35.

³ Soebiyono, *Dwifungsi ABRI Perkembangan Dan Peranannya Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1972), hlm. 33.

⁴ M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik: Suatu Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Pembangunan Bagi Keberadaan Islam Politik di Indonesia era 1970-an dan 1980-an*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 53-54.

⁵ M. Dawan Raharjo, *Intelektual Muslim, Intelejensia, dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 381-382.

⁶ Ini bisa dilihat dari tulisan Muhammad Nastir di beberapa media, seorang tokoh Masyumi yang pada saat itu bisa dikatakan sebagai tokoh yang mewakili pihak Islam yang menginginkan kelahiran

negara Islam, tapi beliau tetap menempuh jalur parlemen untuk mewujudkan itu semua.

⁷ Afan Gaffar dan Moh. Mahfud, "Dua menteri Agama dalam Pergumulan Politik hukum Islam di Indonesia", dalam Abdurahman et.al (ed), *Agama dan Masyarakat: 70 tahun H.A. Mukti Ali*, (Yogyakarta: IAIN sunan Kalijaga Press, 1993), hlm. 126-127.

⁸ Kuntowijoyo, *Serat Cebolek dan Mitos Pembangunan Islam: Melacak Asal Usul Ketegangan antara Islam dan Birokrasi*, (Bandung: Mizan, 1991), hlm 71.

⁹ Pada Tahun 1989 diundangkan Undang-undang No. 2 tahun 1989 yang memasukkan sistem pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

¹⁰ Nurkholis Majid menulis tentang Orde Baru: "Bagaikan suatu perjalanan sentimental, membicarakan Islam dan politik di Indonesia melibatkan kekhawatiran dan harapan lama yang mencekam. Daerah ini penuh dengan ranjau kepekaan dan kerawanan, sehingga pekerjaan harus dilakukan dengan kehati-hatian secukupnya. Tetapi berhati-hati tidaklah berarti membiarkan diri terlambat dan kehilangan tenaga untuk melangkah, sebab jelas pembicaraan harus dilakukan juga, mengingat berbagai alasan dan keperluan". Lihat Nurkholis Majid, "Suatu Tahapan Islam terhadap Masa Depan Politik Indonesia", dalam *Prisma*, Nomor Ekstra, Tahun XIII, (Jakarta: LP3ES, 1984), hlm. 10.

¹¹ Tanggal 3 Januari 1970, organisasi-organisasi pemuda Islam tersebut mengadakan seminar di gedung Islamic Resource Center, Menteng, dalam makalahnya yang berjudul "Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat", Nurkholis Majid menegaskan

tentang pentingnya persoalan pembaharuan pemikiran, mengingat umat Islam Indonesia sekarang ini dipandang telah mengalami kejenuhan dan di bidang pemikiran dan pengembangan ajaran-ajaran agama telah kehilangan gerak psikologis dalam perjuangannya.

¹² Azyumardi Azra, *Peta Sosio-Historis Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia: Dari Awal Masuknya Islam Sampai Abad ke-20*, (Jakarta, Penerbit Panitia Kolokium 1 Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia PB HMI, 1996), hlm. 19.

¹³ Nurcholis Madjid, "Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat", dalam Utomo Dananjaya, *Pembaharuan Pemikiran Islam*, (Jakarta: Penerbit Islamic Research Center, 1970), hlm. 11.

¹⁴ Bachtiar Efendy, *Peta Sosio Historis Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Panitia Kolokium 1 Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia PB HMI, 1996), hlm. 34..

¹⁵ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 144-145.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 155.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 162.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 175.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 178.

²⁰ *Ibid.* hlm. 182.

²¹ Satu-satunya tokoh cendekiawan yang menolak kehadiran ICMI adalah Abdurahman Wahid. Dia beralasan: pertama, baginya, ICMI merupakan salah satu contoh telanjang bagaimana rezim ini memanipulasi

Islam agar memperoleh dukungan dan simpati demikian mengukuhkan legitimasi kekuasaannya. Kedua, melalui ICMI, para tokoh cendekiawan Islam membiarkan diri mereka dimanipulasi oleh Soeharto agar berpeluang melaksanakan agenda politik mereka sendiri. Masalah yang timbul adalah ICMI memberi peluang bagi beberapa tokoh Islam yang tidak menghayati visi kenegaraan yang menekankan kemajemukan berdasarkan toleransi beragama dan persatuan nasional. Lagi pula, dukungan ICMI kepada pemerintah jelas memperlambat datangnya momentum bagi perubahan politik. Bahkan kelahiran ICMI telah mendorong kembalinya faktor agama dalam proses politik, sesuatu yang selama lebih dari dua puluh tahun diusahakan pemisahannya. Banyak kalangan cendekiawan terkemuka di ICMI yang menganjurkan dibinanya masyarakat Islam di Indonesia Gus Dur curiga bahwa mereka yang menganjurkan pembinaan masyarakat Islam itu, dalam kenyataannya masih berupaya terus untuk menegakkan sebuah negara Islam. Oleh karena itu Abdurahman Wahid menyimpulkan bahwa masyarakat Islam jelas bertentangan dengan masyarakat Pancasila yang bersifat toleran. Hal lain yang menjadi kekhawatiran dengan berdirinya ICMI adalah kemungkinan reaksi negarif dari ABRI yang dampaknya dapat mengenai semua umat Islam.

²² Respon Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru yang mulai akomodatif terhadap umat Islam disambut dengan hangat. Kenyataan ini dapat dilihat pada waktu delapan wakil Muhammadiyah menghadap presiden Soeharto di Istana negara. Ini terjadi tanggal 10 Maret 1992. Delegasi ini dipimpin oleh Azhar Basyir (ketua PP) yang didampingi tujuh fungsionaris lain: Ismail Suni, Amin Rais, Watik Pratiknya,

Ramli Thaha, Projokusumo, Sutrisno Muhdan, dan AR Fakhruddin, mereka menghadap presiden selain dalam rangka silaturahmi dan melaporkan hasil Tanwir 1992 yang hasilnya antara lain mensukseskan Pemilu 1992 untuk menghadapi SU MPR 1993, juga menyampaikan keinginan untuk mencalonkan kembali presiden Soeharto dalam masa jabatan presiden mendatang (1993-1998).

²³ Bahtiar Efendy, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina), hlm. 273.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 276.

²⁵ Ada juga pengamat yang melihat kebijakan pemerintah tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukan sebuah bentuk akomodasi pemerintah terhadap umat Islam. Hal ini bisa dilihat dengan keuntungan yang lebih banyak didapat oleh pemerintah daripada umat Islam. Orde Baru dengan watak hegemonik yang luar biasa besar sejak awal telah mendeklarasikan dirinya sebagai Orde Pembangunan. Pembangunan di sini lebih dimaknai sebagai pembangunan ekonomi, maka hukum menjadi subordinat terhadap pembangunan ekonomi, sehingga akibatnya hukum bukan lagi menjadi alat perubahan sosial, alat pembebasan, atau sarana pencapaian keadilan sosial, tetapi menjadi penunjang dan pelengkap pembangunan. Dengan demikian hukum dalam wacana politik Orde Baru lebih terkonsentrasi pada fungsinya sebagai alat pembangunan. Salah satu ciri penting Hukum Islam adalah sifatnya yang fleksibel sehingga banyak melahirkan aliran-aliran pemikiran. Kasus terbitnya kebijakan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dari beberapa segi. Dari segi pembentukannya KHI lahir secara semi-

responsif. Maksudnya peranan pemerintah (eksekutif) dan yudikatif amat besar, sementara ulama/cendekiawan berada dalam posisi perifer. Dari segi materi hukum, kelahiran KHI ditandai dengan sifatnya yang reduksionistik. Bila Inpres No. 1/1991 tersebut dibaca secara kritis, terungkap bahwa menurut Inpres tersebut, landasan atau dasar serta rujukan KHI adalah Pancasila, UUD 1945, UU No. 14/1970, UU. No. 14/1985, UU No. 1/1974, dan PP No. 28/1977. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang sudah disepakati sama sekali tidak disebut-sebut sebagai bahan rujukan. Selain itu, secara material KHI hanya meliputi wilayah hukum perdata menyangkut hukum-hukum keluarga, padahal hukum Islam memiliki bidang garapan yang jauh lebih luas.

²⁶ Bakhtiar Efendi, *op. cit.*, hlm 278.

²⁷ *Ibid.*, hlm 305.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 308.

²⁹ Sudirman Teba, *Islam Menuju Era Reformasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. xv.

³⁰ *Ibid.*, hlm xviii.

³¹ Makalah yang disampaikan dalam peluncuran buku Robert E Elson, *Suharto: A Political Biography*, di Jakarta, 22 Januari 2002, Elson mengungkapkan alasan menulis biografi Soeharto karena Soeharto dapat bertahan selama 32 tahun dan tertarik untuk melihat apa pengaruh kekuasaannya bagi Indonesia kini dan mendatang, Buku biografi ini menceritakan perjalanan Soeharto yang berusaha mentransformasikan Indonesia menjadi sebuah negara bangsa yang kuat, bersatu, dan sejahtera, namun setelah hampir setengah abad pengaruhnya, ia hanya diingat sebagai seorang yang melakukan kejahatan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Afan Gaffar dan Moh. Mahfud, "Dua menteri Agama dalam Pergumulan Politik Hukum Islam di Indonesia", dalam Abdurahman et al (ed), *Agama dan Masyarakat: 70 Tahun H.A. Mukti Ali*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993.
- Bachtiar Efendy, *Peta Sosio Historis Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Panitia Kolokium 1 Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia PB HMI, 1996.
- ___, *Islam dan Negara, Trasformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
- Kamuaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis & Fundamentalis*, Magelang: Indonesia Tera, 2001.
- Kuntowijoyo, *Serat Cebolek dan Mitos Pembangkangan Islam: Melacak Asal Usul Ketegangan Antara Islam dan Birokrasi*, Bandung: Mizan, 1991.
- M. Dawan Raharjo, *Intelektual Muslim, Intelejensia, dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, 1993.
- M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik: Suatu Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Pembangunan bagi Keberadaan Islam Politik di Indonesia Era 1970-an dan 1980-an*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Nurcholis Madjid, "Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat", dalam Utomo Dananjaya, *Pembaharuan Pemikiran Islam*, Jakarta: Penerbit Islamic Research Center, 1970.
- ___, "Suatu Tahapan Islam terhadap Masa Depan Politik Indonesia", dalam *Prisma*, Nomor Ekstra, tahun XIII, Jakarta: LP3ES, 1984.
- Soebiyono, *Dwifungsi ABRI Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1972.
- Sudirman Teba, *Islam Menuju Era Reformasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.